



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG MULYANI**
2. Jabatan : **KETUA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA**
3. NHK : **688493**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.895.000.000

1. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 54.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 970 m2/200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 581.000.000
3. Tanah Seluas 912 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
7. Tanah Seluas 859 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA BLACK Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY GD8 1.5 VTI MT SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.800.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. 50.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 589.043.174



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.640.843.174
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.640.843.174

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.